

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS**  
**KORUPSI (WBK) PADA UNIT ORGANISASI DIREKTORAT PENANGANAN**  
**PERMASALAHAN HUKUM**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Unit Organisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Unit Organisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Unit Organisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA UNIT ORGANISASI DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun rencana kerja dan mempersiapkan serta melaksanakan proses/tahapan-tahapan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
  - b. Menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi Zona Integritas;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit organisasi terkait pemantauan, evaluasi, dan pengawasan untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit organisasi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Desember 2025

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI  
BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI  
(WBK) PADA UNIT  
ORGANISASI DIREKTORAT  
PENANGANAN  
PERMASALAHAN HUKUM

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 18 Desember 2025

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI (WBK) PADA UNIT ORGANISASI DIREKTORAT PENANGANAN  
PERMASALAHAN HUKUM**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	
1	Pengarah	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	
2	Ketua Tim Kerja	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	
3	Koordinator Tim Kerja 1 (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia)	Donald Sutanto Panjaitan	
4	Tim Manajemen Perubahan	Ketua Tim	Putri Triyandini
		Anggota	Safira Rachmadewi
5	Tim Penataan Tata Laksana	Ketua Tim	Dipo Adi Negoro
		Anggota	Siti Horiah Reren Febri Humaira

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	
6	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Ketua Tim	Carolina Maria A.
		Anggota	Rizka Rahmalita Fadhila
7	Koordinator Tim Kerja 2 (Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	Rinaldi Morintosh	
8	Tim Penguatan Akuntabilitas	Ketua Tim	Hilman Fazri
		Anggota	Jefry Seftian Isfa Aulia Nurrachmah
9	Tim Penguatan Pengawasan	Ketua Tim	Moch. Ilham Riswanda
		Anggota	Helmi Mutie Sofie Tri Astutik
10	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketua Tim	Koco Doyo Mielopo
		Anggota	Yoma Triadi Busra

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA